**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN
TERKAIT PERIZINAN
(Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)**

***JURIDICAL ANALYSIS *RATIO DECIDENDI* OF RULINGS AGAINST
LAW ENFORCEMENT OF BANKING CRIMES
RELATED LICENSING
(Study Verdict No. 222/Pid.B/2018/PN Mks)***

Oleh:

Muh. Rizal S¹, Bakhtiar², Andika Wahyudi Gani³

^{1, 2, 3}Universitas Negeri Makassar

¹rizalsuyuti@unm.ac.id; ²bakhtiar@unm.ac.id; ³andikawgani@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai *ratio decidendi* putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan terkait perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks). Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Didasarkan pada kronologi kasus tersebut bahwa tindak pidana perbankan khususnya yang berkaitan dengan perizinan memiliki modus *operandi* yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap industri keuangan melainkan dapat pula berdampak negatif jika dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Alih-alih mendapatkan keuntungan 2% per harinya dengan cara investasi dalam bentuk *trading system* yang mengandalkan *robotic*, kehilangan dana yang disetor justru menjadi kompensasi atas risiko untuk meraih keuntungan secara instan. (2) *Ratio decidendi* pada putusan PN Makassar dalam perkara Nomor 222/Pid.B/2018 meliputi fakta-fakta materil. Fakta tersebut berupa orang dan korporasi yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menawarkan program aplikasi *trading system* dengan keuntungan 2% per harinya. Pelaku terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kemudian dapat dipersamakan sebagaimana tabungan yang di maksud oleh pasal 46 ayat (1). Hal tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim karena hakim menafsirkan bahwa meski tindakan menghimpun dana oleh pelaku bukan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga perbankan melainkan dapat di persamakan dengan hal itu. Dari sini dilihat bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih memiliki sifat futuristik karena masih dapat menjangkau tindak pidana yang tergolong bersifat futuristik karena melibatkan teknologi di dalamnya.

KATA KUNCI: *Ratio Decidendi, Putusan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana*

ABSTRACT: The study aims to obtain an overview of the *ratio decidendi* of judgments against law enforcement of banking crimes related to licensing (Study Decision Number 222 /Pid.B/2018/PN Mks). The results of the study are as follows: (1) It is based on the chronology of the case that banking crimes, especially those related to licensing, have a

fairly complex *modus operandi*. Technological advances not only have a positive impact on the financial industry but can also have a negative impact if used by certain individuals. Instead of getting a profit of 2% per day by investing in a trading system that relies on robotics, losing deposited funds is actually compensation for the risk to make an instant profit. (2) The *ratio decidendi* in the decision of PN Makassar in case No. 222/Pid.B/2018 includes material facts. This fact is in the form of people and corporations that raise funds in the community by offering a trading system application program with a profit of 2% per day. The perpetrator is proven to have collected community funds without permission as considered by the judge in interpreting the community fund collection activities carried out by the perpetrator can then be equated as savings intended by article 46 paragraph (1). This was a legal discovery by the judge because the judge interpreted that although the act of collecting funds by the perpetrator was not a collection of funds carried out by a banking institution but could be equated with it. From this, it can be seen that banking laws, especially article 46, still have a futuristic nature because they can still reach criminal acts that are classified as futuristic because they involve technology in them.

KEYWORDS: Ratio Decidendi, Verdict, Law Enforcement, Criminal Act

PENDAHULUAN

Industri perbankan di tanah air bukan sebuah lembaga keuangan yang masih seumuran jagung. Dalam sejarah besar bangsa Indonesia, lembaga perbankan sudah mulai familiar di masyarakat sejak era bank pertama kali di kenal di Nusantara¹ yaitu *De Javasche Bank*, yang diperkirakan eksis sekitar tahun 1828. Perbankan sebagai industri sekaligus lembaga keuangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena dapat menjadi perantara antara transaksi keuangan debitur yang kekurangan dana dan kreditur yang kelebihan dana atau dapat pula menjadi pihak kreditur maupun debitur dan bank juga memiliki fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil.

Gunarto Suhardi,² merinci bahwa lembaga perbankan pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang khas antara lain, Bank sebagai Lembaga Keuangan karena bank diberi ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh bank sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-undang Perbankan³. Kedua, Bank diberi izin oleh Penguasa Moneter, yang dimaksud penguasa moneter dalam hal ini yaitu Bank Indonesia. Ketiga, Bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat. Keempat, bank sebagai lembaga perantara.

Sebagai pihak perantara transaksi keuangan maupun intermediasi, bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk menciptakan atau mewujudkan perbankan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi maka

¹ Nusantara merupakan istilah yang di populerkan kembali oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker atau Dr. Setiabudi, istilah ini digunakan untuk merefleksikan tanah air Indonesia pada saat pra kemerdekaan sekitar tahun 1920. Penjelasan tentang kata nusantara dapat ditemukan di dalam buku-buku tentang sejarah Indonesia dan

wawasan kebangsaan yang banyak beredar saat ini.

² Gunarto Suhardi, 2003 *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 18-20.

³ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

dibutuhkan lembaga perbankan yang sehat. Namun seiring berkembangnya dunia ekonomi, dunia perbankan tanpa terkecuali juga ikut berkembang antara lain dapat dilihat dengan banyaknya bank-bank yang terus bermunculan baik dari swasta maupun pemerintah ataupun Bank Perkreditan Rakyat, bersamaan itu pula perbankan dewasa ini, memiliki rupa dan macam-macam jasa yang di tawarkan.

Berkembangnya dunia perbankan adalah hal yang wajar dan lumrah karena kegiatan ekonomi baik yang bersifat nasional, internasional bahkan regional sekalipun tidak terlepas dengan dunia perbankan. Namun di sisi lain timbul masalah-masalah yang krusial yang sampai saat ini menjadi pekerjaan rumah di industri keuangan khususnya di perbankan, sehingga lembaga perbankan sering dianggap tidak sehat. Hal ini disebabkan antara lain banyak terjadinya penyalahgunaan wewenang oknum perbankan maupun di luar perbankan yang memanfaatkan eksistensi dan berkembangnya dunia perbankan baik itu berbentuk tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan. Salah satu di antaranya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, yang diatur dalam pasal 46 Undang-undang Perbankan⁴ yang secara eksplisit menerangkan bahwa :

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Pada dasarnya terdapat ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana masyarakat tanpa izin otoritas yang berwenang dibidang lembaga keuangan perbankan maupun perbankan seperti pada bunyi pasal 46 ayat (1) tersebut. Jika diamati dari ketentuan pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa pasal ini juga dapat mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menjerat korporasi dengan adanya frasa *“barang siapa”*. Ketentuan dalam pasal 46 ayat (1) ini pula tidak semata-mata dapat langsung diterapkan secara *zaklek* karena dalam pasal-pasal tersebut masih terdapat frasa-frasa yang masih membutuhkan penafsiran antara lain, *pertama*, apakah yang di maksud dengan frasa *“menghimpun dana dari masyarakat”*. *Kedua*, apakah yang dimaksud dengan *“bentuk simpanan”*, apakah yang dimaksudkan dalam pasal ini simpanan-simpanan yang hanya berupa Giro, Tabungan, Deposito, sertifikat deposito atau adakah bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif – analitik yang melihat langsung dari sudut penerapan pasal 46 itu sendiri yaitu dengan mengkaji suatu putusan pengadilan yang menerapkan pasal tersebut dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara atau dengan melihat *ratio decidendi* dari suatu putusan pengadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

⁴ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

yuridis normatif, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Decidendi dalam putusan PN Makassar Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks Tahun 2018

Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.⁵ Salah satu alasan menentukan pembuatan putusan dalam lembaga peradilan ialah adanya Rasio decidendi atau pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus suatu perkara. *Ratio decidendi* Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan.⁶ Hakim mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para

pihak yang terkait dengan pokok perkara. Istilah-istilah lain yang sama artinya seperti *rasio decidendi* adalah *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision*.⁷

Pada umumnya, hakim merupakan organ tertinggi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Menurut Bambang Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim sebagai corong undang-undang yang dianggap memahami hukum tentunya berkewajiban untuk melihat pemenuhan unsur-unsur terlebih dahulu yang dijeratkan kepada terdakwa apakah terpenuhi atau tidak sehingga dapat menentukan seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Adapun dalam hal ini hakim menilai bahwa pelaku telah memenuhi unsur dari ketentuan pasal 46 ayat (1) karena telah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa seizin bank Indonesia.

Jika berbicara mengenai ketentuan dalam pasal 46 ayat (1) dapat dilihat bahwa untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan disyaratkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu oleh pemegang otoritas. Karena simpanan

⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, hlm. 190.

⁶ Yan Pramadya Puspa, dalam Mochammad Alfi Muzakki, 2011, "*Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis*

Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010", Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9.

⁷ "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia", Vol-III/No. 02/AGUSTUS/2010, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat, hlm. 117-118.

merupakan hak milik yang masih menjadi hak penyeter simpanan meskipun sementara di simpan dalam bentuk yang berbeda seperti giro/tabungan ataupun lainnya.⁸ Dalam pasal ini pula kegiatan penghimpunan dana berbentuk simpanan harus memerhatikan pula syarat minimal untuk memperoleh izin sebagaimana di maksud dalam pasal 16 undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan:

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: (a) Susunan organisasi dan kepengurusan; (b) Permodalan; (c) Kepemilikan; (d) Keahlian di bidang Perbankan; (e) Kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Izin tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.⁹ Pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank

Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana di masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.¹⁰

Adapun dalam pasal 46 ayat (2) menerangkan bahwa, jika kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT), Yayasan, Perserikatan, atau Koperasi, maka penuntutan dapat dilakukan kepada: (a) Pemberi perintah; (b) Atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau kedua-duanya.¹¹

Berdasarkan pendapat Setiyono yang menyatakan Pasal 46 ayat (2) tersebut di atas telah mengakui korporasi dapat melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan tetapi yang bertanggungjawab bukan korporasinya melainkan mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Hal ini berarti Undang- Undang Perbankan ini masih mengikuti pemikiran bahwa yang dapat melakukan tindak pidana itu hanyalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).¹²

Dalam kasus ini hakim membagi ketentuan dalam pasal 46 ayat (1) menjadi dua unsur pokok yang harus terpenuhi yaitu unsur "barang siapa" dan unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang di persamakan), tanpa izin usaha dai pimpinan bank Indonesia."

Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi karena unsur barang siapa

⁸ Gunarto Suhardi, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁹ Chainur Arrasjid, 2011, "Hukum Pidana Perbankan", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

¹⁰ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 69.

¹¹ Chainur Arrasjid, *ibid* hlm 49

¹² Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. I. Banyumedia Publishing, Malang, h. 130

dalam hal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum. Hal ini tentu menerangkan pula bahwa pertanggung jawaban pidana oleh pelaku sebenarnya bukan sebagai *natuurlijke persoon* melainkan pertanggung jawaban pelaku sebagai yang mewakili Koperasi Segitiga Bermuda dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.

Adapun pertimbangan terhadap unsur kedua yaitu menghimpun dana masyarakat, hakim menilai bahwa pelaku mengelola profitwin77 sejak awal bulan Mei 2016 dan tidak mempunyai izin dari Pimpinan Bank Indonesia dan Koperasi Segitiga Bermuda didirikan pada bulan Juli 2016 juga tidak mempunyai status Badan Hukum di mana penawaran profitwin77 adalah paket simpanan/investasi (*bronze, silver, gold, platinum* dan *titanium*) dengan penawaran keuntungan/profit/imbalance sebesar 2% per hari dari nilai produk simpanan/investasi yang dibeli dapat dipersamakan dengan karakteristik tabungan karena terdapat penyerahan dana dari masyarakat dan terdapat unsur imbalan berupa uang dengan persentase tertentu, sehingga atas perbuatan tersebut yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia dan Koperasi Segitiga Bermuda yang didirikan oleh terdakwa tidak berbadan hukum yang mengakibatkan banyak anggota atau nasabah profitwin77 yang mengalami kerugian. Dari uraian di atas hakim berpendapat bahwa pelaku juga telah memenuhi unsur kedua tersebut.

Yang menarik dalam kasus ini ialah terkait dengan pemenuhan unsur yang kedua yaitu terkait dengan bentuk *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa unsur kedua telah terpenuhi. Hakim memaknai bahwa

simpanan yang dilakukan oleh anggota Profitwin77 merupakan sebuah investasi yang dapat dipersamakan dengan karakteristik simpanan berbentuk tabungan. Berbicara mengenai tabungan maka dapat dilihat dalam pasal 1 angka 9 UU Perbankan yang secara terang mengatakan bahwa :

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Pemaknaan tabungan dalam hal ini menurut hemat penulis justru memiliki sisi kelemahan karena untuk menentukan persamaan karakteristik bentuk simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut cukup sulit karena karakteristik tabungan itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 9 tidak secara gamblang menyebutkan karakteristik suatu tabungan. Sedangkan pengertian simpanan sendiri tertuang di dalam pasal 1 angka 5: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;”

Adanya frasa “*bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu*” merupakan peluang hakim untuk melakukan penemuan hukum. Karena penulis menafsirkan bahwa pembentuk undang-undang membuat frasa tersebut agar hakim dapat leluasa menerapkan pasal itu untuk menjerat pelaku tindak pidana. Namun hakim harus pandai menilai dan menafsirkan bahwa suatu simpanan dapat di persamakan dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 46 ayat (1). Tindakan menafsirkan oleh hakim pada dasarnya sah untuk dilakukan menurut hukum namun dalam kaedah dan batas-batas tertentu. Menurut

Cst. Kansil dalam bukunya pengantar Ilmu Hukum,¹³ hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang itu sendiri, oleh karena itu dalam hukum pidana dikenal dengan penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Selain daripada hal tersebut yang perlu diperhatikan sifat hukum pidana itu berbeda dengan hukum perdata yang di mana perbedaannya terletak pada dasar keputusan hakim dalam memutus. Dalam hukum acara perdata dikenal prinsip putusan hakim itu cukup dengan mendasarkan diri kepada kebenaran *formil* saja (akta tertulis dan lain-lain), berbeda dengan pidana yaitu putusan hakim harus mencari kebenaran materiil (menurut keyakinan, perasaan, dan perasaan keadilan hakim itu sendiri).¹⁴ Perbedaan prinsip tersebut tentu memberikan peluang untuk hakim dalam perkara pidana untuk melakukan penilaian terhadap setiap perkara yang didasarkan pada keyakinan.

Hakim dalam hal ini meyakini bahwa penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang dilakukan oleh Profitwin77 merupakan bentuk simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 karena adanya frasa dalam simpanan “bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu” .

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penerapan hukum pasal 46 ayat (1) terkait tindak pidana perbankan terkait dengan perizinan, tidak memiliki sifat yang *rigid* dan kaku karena masih dapat diperluas cakupannya dengan adanya pemaknaan yang luas dari tabungan ataupun simpanan. Sehingga dari hal ini pula menerangkan bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih dapat diterapkan untuk konteks kekinian

yang artinya masih mampu menjawab perkembangan hukum khususnya di bidang perbankan sampai saat ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Didasarkan pada kronologi dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana perbankan khususnya yang berkaitan dengan perizinan dewasa ini memiliki modus *Operandi* yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap industri keuangan melainkan dapat pula berdampak negatif jika dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Alih-alih mendapatkan keuntungan 2% per harinya dengan cara investasi dalam bentuk *trading system* yang mengandalkan *robotic*, kehilangan dana yang di setor justru menjadi kompensasi atas risiko untuk meraih keuntungan secara instan. (2) *Ratio decidendi* pada putusan PN Makassar dalam perkara Nomor 222/Pid.B/2018 meliputi fakta-fakta materiil. Fakta tersebut berupa orang dan korporasi yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menawarkan program aplikasi *trading system* dengan keuntungan 2% per harinya. Pelaku terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kemudian dapat dipersamakan sebagaimana tabungan yang di maksud oleh pasal 46 ayat (1).

Hal tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim karena hakim menafsirkan bahwa meski tindakan menghimpun dana oleh pelaku

¹³ Cst Kansil “Pengantar Ilmu Hukum” hlm 29.

¹⁴ Ibid, hlm 31

bukan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga perbankan melainkan dapat di persamakan dengan hal itu. Dari sini dilihat bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih memiliki sifat futuristik karena masih dapat menjangkau tindak pidana yang tergolong bersifat futuristik karena melibatkan teknologi di dalamnya.

Tindak pidana perbankan di dasari dari berbagai modus operandi yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, seperti yang telah penulis jelaskan dalam penelitian ini. Penulis menyarankan sebaiknya pengawasan dalam industri keuangan harus di tingkatkan, pengawas yang dimaksud dalam hal ini ialah OJK dan Bank Indonesia sebab berbagai modus dalam tindak pidana perbankan yang terjadi saat ini cukup kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chainur Arrasjid, 2011, "Hukum Pidana Perbankan", Sinar Grafika, Jakarta.
- Cst Kansil "Pengantar Ilmu Hukum".
- Gunarto Suhardi, 2003 Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiyono, 2013, Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cet. I. Banyumedia Publishing, Malang.
- Tim Peneliti OJK, Pahami dan Hindari "Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan, tanpa penerbit.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Zainal Asikin, 2016, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal, Karya Ilmiah

Komisi Yudisial, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia", Vol-III/No. 02/AGUSTUS/2010, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat, hlm. 117-118.

M. Arief Amrullah, Jurnal Ilmiah Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan.

Yan Pramadya Puspa, dalam Mochammad Alfi Muzakki, 2011, "Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)", Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9

C. Peraturan

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

D. Putusan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks